

## **Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang**

**Inah Lestari<sup>1</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Serang, Indonesia  
[6661210009@untirta.ac.id](mailto:6661210009@untirta.ac.id)

**Hasuri Waseh<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Serang, Indonesia  
[Hasuri@untirta.ac.id](mailto:Hasuri@untirta.ac.id)

**Teguh Aris Munandar<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Serang, Indonesia  
[teguharis86@untirta.ac.id](mailto:teguharis86@untirta.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research is motivated by the problem of unemployment which results in employment problems and problems in evaluating competency-based job training programs at the Serang Regency Manpower and Transmigration Office. These problems include lack of human resources and minimal collaboration in the training process, lack of program socialization to the community, limited facilities and infrastructure, and incompatibility of training with industry needs. This study aims to evaluate the success of competency-based job training programs using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model developed by Stufflebeam (2003). The method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman (2023) model, which includes the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the program still has several obstacles in its implementation, such as the unavailability of instructors from within the Serang Regency Manpower and Transmigration Office, limited vocational training each year, no continuous supervision during the training, no regulations governing the technical time of the training, limited facilities, and uneven distribution of places for implementing competency-based work training programs and inadequate budget sources to support the implementation of competency-based work training programs.*

**Keywords:** Evaluation, competency-based job training, unemployment.

## LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Salah satu dampak dari peningkatan jumlah penduduk adalah munculnya permasalahan pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Masalah dalam perekonomian akibat pengangguran dapat menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Permasalahan ketenagakerjaan berkaitan dengan Kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama pada negara berkembang atau tertinggal. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhi termasuk faktor politik, sosial, dan budaya (Fadillah et al., 2024).

Pemerintah Indonesia melakukan dan menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani masalah pengangguran yang mempengaruhi ketenagakerjaan. Salah satu kebijakan tersebut adalah pelatihan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka terjadi bukan hanya di Indonesia saja melainkan di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran terbuka menurut badan pusat statistik, TPT di Provinsi Banten tahun 2024 mencapai 6,68 persen. Hal ini tentunya memiliki daerah menunjang yang memiliki TPT berbeda-beda salah satunya yaitu TPT terbesar di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang memiliki tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2024. Sebagai pusat pemerintahan, Kabupaten Serang menjalankan pembangunan dan strategi pemerintah, menghadapi berbagai permasalahan, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Kabupaten Serang memiliki luas wilayah 1.467,35 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.701.800 jiwa pada tahun 2024. Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan dan 326 desa. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Kabupaten Serang memiliki tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 mencapai 9,18%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang tinggi di bandingkan dari Kabupaten atau kota yang ada di provinsi banten, Kabupaten Serang merupakan penyumbang TPT terbesar di Provinsi Banten. Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Serang pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan wilayah Kabupaten atau Kota yang berada di Provinsi Banten pada tahun 2024. Hal tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pada faktor jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Serang.

Masalah Pengangguran di Kabupaten Serang merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah kabupaten serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan TPT di Kabupaten Serang melalui peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan yang mengatur keseluruhan penyelenggaraan ketenagakerjaan di wilayah

Kabupaten Serang. Dalam usaha peningkatan masyarakat melalui pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia (Munandar, 2020).

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Serang mewujudkan upaya tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang khususnya di bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program ini bertujuan memberikan dampak positif bagi pencari kerja, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan praktis untuk bersaing di pasar kerja. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi mencakup berbagai bidang kejuruan, seperti otomotif, servis HP, pengelasan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), teknik listrik, serta menjahit. Program ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan di BBPVP sebagai bagian dari paket bantuan pelatihan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan di berbagai kecamatan atau desa di Kabupaten Serang. Tabel 1 menunjukkan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi.

**Tabel 1. Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi tahun 2021-2024**

Tahun	Kejuruan	Paket	Jumlah Peserta	Sumber Anggaran
2022	1. Menjahit	2	32	APBD
	2. Las Listrik	1	20	APBN
JUMLAH			52	
2023	1. Menjahit	3	48	APBD
	2. Pelatihan teknisi		23	APBN
	3. Pelatihan Leader Mesin		6	APBD
	4. Pelatihan Teknik, las, TIK , Manufaktur		165	APBN
JUMLAH			242	
2024	1. Menjahit	3	48	APBD
	2. Otomotif sepeda motor	1	16	APBD
JUMLAH			64	

*(Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang)*

Tabel 1 menunjukkan jumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Tabel tersebut menunjukkan kenaikan dan penurunan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pada tahun 2024 jumlah peserta yang mengikuti berjumlah 64 peserta dengan kejuruan yang dilaksanakan yaitu 2 paket pelatihan menjahit

dan otomotif sepeda motor. Dari data tersebut memiliki permasalahan pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Program pelatihan kerja berbasis kompetensi sudah berjalan cukup lama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, tentunya dalam pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan hambatan tersebut sebagai berikut.

Permasalahan Pertama, ketidak berhasilan pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi dapat di tandai dengan beberapa permasalahan di antaranya Pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang dan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja di Kabupaten Serang. Hal tersebut dapat di lihat dari beberapa permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi pada partisipasi peserta pelatihan pada tabel 1.3 menunjukan tahun 2024 hanya 64 peserta yang mengikuti pelatihan dengan 2 paket bantuan pelatihan kejuruan menjahit dan otomotif sepeda motor.

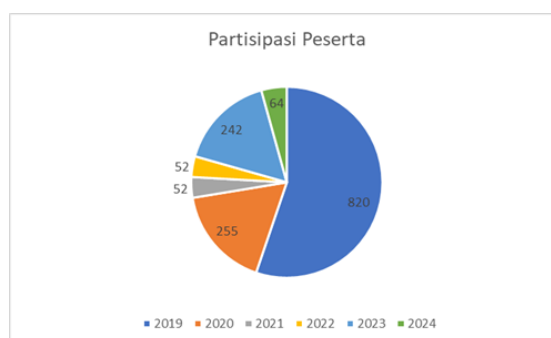
Permasalahan kedua, Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi menyebabkan kegiatan dalam program tersebut mengalami penurunan pelaksanaan setiap tahunnya dan tidak dapat dilaksanakan secara merata di berbagai desa maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi mengalami penurunan jumlah paket kelas setiap tahunnya, dan hanya bisa diikuti satu kelas dengan 16 hingga 20 peserta saja.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi masih di temukan hambatan dalam pelaksanaannya, karena keterbatasan anggaran, sehingga terjadi ketidakmerataan pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di berbagai desa atau kecamatan di Kabupaten Serang.

Permasalahan ketiga, kurangnya infrastruktur pelatihan berupa sarana dan prasarana pada pelatihan kerja dalam kegiatan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang BAB III Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan bahwa "penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) didukung oleh sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat pada salah satu pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi pada kejuruan otomotif sepeda motor yang tidak memiliki sarana prasarana yang cukup memadai Kepala Seksi Pelatihan Kerja, mengatakan bahwa proses pelatihan kerja berbasis kompetensi pada kegiatan pelatihan otomotif sepeda motor dilaksanakan di Kecamatan Petir yang bekerja sama dengan LPK Pengembangan karakter Bangsa, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di bengkel setempat. Akan tetapi, hanya tersedia alat-alat otomotif seperti kunci, tang, palu, dongkrak, dan perlengkapan pada umumnya, namun tidak memiliki perlengkapan lengkap seperti di bengkel-bengkel besar. Ketersediaan sarana dan prasarana tentunya menjadi penunjang keberhasilan dalam melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Permasalahan keempat, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang sangat rendah. peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi setiap tahun mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak stabil di karenakan paket bantuan pelatihan yang di berikan atau dilaksanakan kepada masyarakat pelatihan kerja berbasis kompetensi mengalami penurunan penyediaan jumlah paket pelatihan sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Serang dalam mengikuti program pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan kejuruan yang berbeda-beda. Artinya pembukaan pelatihan kerja berbasis kompetensi pada masing- masing kejuruan yang di laksanakan tidak konsisten seperti contohnya di tahun 2019 membuka 9 jenis kejuruan pelatihan kerja berbasis kompetensi akan tetapi di tahun berikutnya tidak membuka 9 jenis kejuruan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi masyarakat Kabupaten Serang. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

**Gambar 1. menunjukan Tingkat partisipasi Masyarakat kabupaten serang dalam mengikuti program pelatihan kerja berbasis kompetensi.**



*(Sumber : Dinas Tenaga Kaerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang)*

Permasalahan kelima, kurangnya proses kolaborasi dan tindak lanjut dalam proses kerjasama antar pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam mengawasi pelatihan kerja berbasis kompetensi. Hal ini di tunjukan dengan adanya beberapa permasalahan seperti kurangnya sumber daya aparatur di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk melakukan monitoring, pemantauan dan evaluasi terhadap program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan Kepala Seksi Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang membenarkan bahwa tidak ada tim yang dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk melakukan pengawasan dan pendampingan hingga peserta pelatihan benar-benar mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha secara mandiri. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang hanya melaksanakan program pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya, jika pelaksanaan program pelatihan kerja hanya lima hari, maka terdapat pembukaan dan penutupan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Dalam pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang mengalami kekurangan sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang pelatihan.

Pelatihan kerja berbasis kompetensi pada tahun 2024 pada pelatihan menjahit terdapat 3 paket pelatihan yang dilaksanakan di desa sukamenak, desa sukacai kecamatan baros dan desa Babakan Kecamatan Bandung, dan satu paket pelatihan otomotif dilaksanakan di desa tambiluk kecamatan petir.

Permasalahan keenam yaitu ketidak sesuaian dengan kebutuhan industri. artinya masih banyak masyarakat Kabupaten Serang yang telah mengikuti program pelatihan kerja berbasis kompetensi tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kejuruan yang telah di ikutinya selama proses pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi di selenggarakan tidak mengikuti perkembangan dunia perusahaan dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti ,tertarik untuk meneliti topik tersebut dengan judul "Evaluasi Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang".

Kebijakan program pelatihan kerja berbasis kompetensi menjadi menarik untuk di teliti guna memahami bagaimana evaluasi terhadap program pelatihan kerja berbasis kompetensi dapat dilaksanakan secara efektif atau belum efektif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tahun 2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana keberhasilan dari program pelatihan kerja berbasis kompetensi tahun 2024

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi Kebijakan Publik adalah menilai suatu kebijakan. Menurut Dye dalam Agustino (2016 :169), menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik sebagai berikut *"Is Learning about the consequences of public policy"*. Evaluasi kebijakan dalam bahasa sederhana merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. Dalam konteks ini merupakan suatu penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan secara objektif, sistematis, dan empiris tentang efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari tujuan yang akan di capai. Oleh karena itu, evaluasi berkenan dengan tujuan kebijakan meskipun tidak selalu diketahui tujuan -tujuan kebijakan tertentu atau beberapa program yang saling bertentangan tujuannya. Pemahaman yang hampir sama menurut Jones (1996:198) menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu aktivitas untuk menilai manfaat suatu kebijakan atau program pemerintah.

*"an activity designed to judge the merits of government program witch varies significantly in the specification of object, the techniques of measurement, the method of analysis and the froms of recommendation."*

Pandangan Jones menunjukan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menguji kualitas beberapa jenis program pemerintah. Kegiatan

tersebut diantaranya untuk melihat kondisi objek program, perencanaan teknik pengukuran, dan metode analisis yang digunakan serta format usulan setelah evaluasi dilaksanakan.

Hasil dari penilaian evaluasi yang dilakukan akan dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan. Menurut Wollmann (2007:393) dalam Agustino (2023:45), tujuan evaluasi kebijakan yang pertama adalah untuk menghasilkan penilaian tentang sejauh mana pencapaian tujuan kebijakan (goal attainment). Tujuan ini merupakan konseptualisasi indikator yang tepat jika terukur untuk membuat penilaian untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi evaluasi kebijakan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah proses menilai seberapa berhasilnya suatu program kebijakan. Dengan kata lain evaluasi kebijakan publik digunakan untuk melihat pengaruh dari suatu Keputusan terhadap keadaan tertentu atau untuk melihat tepat dan tidaknya suatu program kebijakan untuk mengatasi permasalahan. Evaluasi ini dilakukan karena semua program kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan sesuai target.

### **Model Evaluasi Kebijakan Publik**

Model Evaluasi Kebijakan publik memiliki beberapa model salah satunya yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis hasil penelitian yang dilakukan pada evaluasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi, menggunakan model evaluasi kebijakan sebagai berikut:

Model CIPP dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam memperkenalkan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, and Product) pada tahun 1966. Model CIPP adalah sebuah model evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan "*a decision oriented evaluation approach structured*" untuk memberikan bantuan kepada para pengambil Keputusan. Model CIPP amat dimungkinkan untuk mengevaluasi berbagai hal, mulai dari tahap perencanaan hingga hasil, memungkinkan hanya digunakan hanya satu atau beberapa komponen evaluasi tertentu sesuai kebutuhan. Model evaluasi dari Daniel L Stufflebeam terdiri dari empat aspek sebagai berikut.

#### **Evaluasi Context**

(Stufflebeam &Coryn, 2014:310-337) Evaluasi Konteks disebut juga sebagai evaluasi kebutuhan, yang menjawab pertanyaan dasar "Tindakan apa yang diperlukan?" Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengembangkan nilai, tujuan sasaran dan prioritas dengan cara mendefinisikan karakteristik lingkungan internal, mengidentifikasi tujuan atau sasaran dan nilai, mendiagnosis masalah atau hambatan yang ada untuk mencapai tujuan atau sasaran, serta dapat mengidentifikasi asset dan peluang.

#### **Evaluasi Input**

(Stufflebeam &Coryn, 2014:310-337) Evaluasi masukan adalah proses evaluasi untuk menjawab pertanyaan "dasar apa yang harus dilakukan?" yang bertujuan untuk memberikan informasi untuk pengembangan desain program, menentukan pendekatan yang relafan dan untuk merekomendasikan strategi proyek alternatif. Cara yang dapat dilakukan dengan

mengidentifikasi dan menilai kemampuan sistem saat memeriksa berbagai strategi intervensi, kendala keuangan atau hukum dan ketersediaan sumber daya.

### **Evaluasi Proses**

(Stufflebeam & Coryn, 2014:310-337) Evaluasi proses hanya fokus menjawab pertanyaan dasar "apakah program sedang di rencanakan dan apakah melakukannya sesuai dengan rencana?" dengan tujuan untuk mendokumentasikan proses pelaksanaan program dan memberikan informasi untuk penyesuaian dalam pelaksanaan. Pendokumentasian proses dan termasuk penyediaan umpan balik mengenai (a) sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang direncanakan (kesesuaian jadwal, penganggaran, prosedur pelaksanaan, konflik yang timbul, kondisi pelaksanaan lapangan serta kekuatan atau kekurangan sumber daya, ketidak sempurnaan desain perencanaan), dan (b) apakah penyesuaian atau revisi rencana diperlukan.

### **Evaluasi Product**

(Stufflebeam & Coryn, 2014:310-337) Evaluasi produk bertujuan untuk menjawab pertanyaan dasar "Apakah Program yang dilaksanakan berhasil?" terdapat tiga tujuan penting yaitu (1) memberikan sumatif informasi yang dapat digunakan untuk menilai manfaat dan dampak program, (2) memberikan informasi formatif yang dapat digunakan dengan penyesuaian atau peningkatan program lain atau program yang sama di masa depan, (3) memberikan kelanjutan dan fleksibilitas program, apakah dapat dipertahankan dalam jangka Panjang dan atau apakah metode dapat digunakan dalam konteks program yang berbeda.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, khususnya di Desa Sukamenak Kecamatan Baros dan Desa Tambilik Kecamatan Petir, desa babakan kecamatan Bandung dan Desa Sukacai Kecamatan Baros yang dilakukan pelaksanaan penelitian pada tahun 2024.

Dalam penelitian ini, menggunakan teori CIPP yang berasal dari Daniel L. Stufflebeam yang terdiri dari 4 aspek, yaitu Evaluasi Konteks, Evaluasi Input, Evaluasi Proses dan Evaluasi Produk. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, Studi Dokumentasi. Untuk mendukung pengumpulan data, digunakan alat bantu seperti tape recorder untuk merekam wawancara, kamera untuk dokumentasi kondisi lapangan selama proses penelitian, dan buku catatan lapangan untuk mencatat hal-hal penting selama observasi. Seluruh data yang telah didapatkan selama proses penelitian yang kemudian akan di analisis oleh peneliti.



Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (1983) yang dikutip dalam (Sugiyono, 2023 :132). Tahapan analisis data tersebut meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan Verifikasi atau penarikan Kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive selain itu Teknik snowball juga di gunakan dalam penelitian ini dengan menentukan informan yang awalnya informan yang digunakan dalam jumlah sedikit kemudian akan bertambah banyak. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini dan di anggap mengetahui informasi dari penelitian yang dilakukan berjumlah 19 informan di antaranya Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Kepala seksi pelatihan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Bidang Pengantar Kerja ahli pertama BBPVP Serang, Pengumpul data dan pengelola pemerdayaan BBPVP Serang, LPKS Pengembangan Karakter Bangsa, LPKS Karisma Menjahit, Ketua PKK Desa Sukamenak Kecamatan Baros, Sekertaris Desa Tambilik Kecamatan Petir, Camat Kecamatan Baros, Kasih Pemerdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Baros, Kasih Pemerdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Petir, Peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi kejuruan menjahit, peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi kejuruan menjahit yang sudah membuka usaha, peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi kejuruan otomotif, dan Masyarakat Kabupaten Serang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Deskripsi hasil penelitian merupakan uraian dari temuan yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan Teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan Kesimpulan. Hasil temuan di lapangan peneliti menganalisis menggunakan teori dari Daniel L. Stufflebeam yang meliputi empat aspek utama, yaitu : Evaluasi Context, Evaluasi Input, Evaluasi Proses, Evaluasi Product. Hasil penelitian dari evaluasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sebagai berikut.

### **Evaluasi Konteks (Context Evaluation)**

Aspek pertama dalam proses evaluasi kebijakan CIPP yaitu Evaluasi context yang di sebut juga sebagai evaluasi kebutuhan. Dalam evaluasi konteks berdasarkan observasi peneliti membagi 2 sub aspek penilaian evaluasi konteks yaitu latar belakang program pelatihan kerja berbasis kompetensi, kedua tujuan dan sasaran program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Berdasarkan temuan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para informan yang dilakukan oleh peneliti, secara keseluruhan evaluasi konteks dinilai sejalan dengan aturan yang mengaturnya serta sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Evaluasi Konteks ditandai oleh hal pertama yaitu pada Latarbelakang program dan kedua yaitu tujuan dan sasaran program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Latarbelakang program pelatihan kerja berbasis kompetensi berdasarkan atas dasar kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang akan pelatihan kerja, masyarakat kabupaten serang nantinya mengusulkan pelatihan yang di butuhkan melalui musrembang, dan terdapat 36 kebutuhan

pelatihan yang di ajukan pada tahun 2024. Selain itu program pelatihan kerja berbasis kompetensi sebagai upaya pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Serang. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan pada Bab III bagian ke satu pelatihan menjelaskan bahwa "Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi pada Balai Latihan yang berkelanjutan". Pedoman pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi telah di atur sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang berisikan latar belakang program, maksud dan tujuan serta anggaran dan instruktur pelatihan. Pelatihan kerja berbasis kompetensi memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan keahlian atau skill masyarakat Kabupaten Serang melalui pelatihan kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Serang dengan cara mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya atau dapat berwirausaha secara mandiri. Sasaran dari program pelatihan kerja berbasis kompetensi yaitu masyarakat Kabupaten Serang yang berusia produktif.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pada evaluasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi dari aspek evaluasi konteks yaitu, pada sub aspek penilaian latar belakang program pelatihan kerja berbasis kompetensi serta tujuan dan sasaran dari program pelatihan kerja berbasis kompetensi, sudah sejalan dan sesuai dengan latar belakang dari pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi, serta terdapat kesesuaian antara tujuan dan sasaran dari di bentuknya program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

### **Evaluasi Input (Input Evaluation)**

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985 :173) evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Sub aspek atau komponen dari evaluasi input atau evaluasi masukan dalam program pelatihan kerja berbasis kompetensi meliputi : (a) Desain Program, (b) Sumber Anggaran, (c) Sumber Daya Manusia.

Program pelatihan kerja berbasis kompetensi sebelum diimplementasikan kepada Masyarakat Kabupaten Serang tentunya memiliki desain program. Desain pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat kesesuaian aturan yang mengaturnya yaitu peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan dalam hal pedoman pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi telah di atur dalam Kerangka Acuan Kerja yang berisikan penjelasan kegiatan, sub kegiatan program, latar belakang program, dasar pelaksanaan, maksud dan tujuan dari pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi, target dan sasaran, waktu pelaksanaan, jumlah peserta pelatihan, instruktur pelatih, metode pelatihan, dan anggaran pelatihan kerja yang telah di tentukan pada proses awal perencanaan pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Sehingga terdapat kesesuaian metode pelatihan yang di berikan kepada peserta pelatihan. Akan tetapi pada desain program pelatihan kerja berbasis kompetensi pada penyediaan kejuruan pelatihan

kerja untuk masyarakat Kabupaten Serang atas dasar usulan dari masyarakat Kabupaten Serang dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Serang hanya dapat melaksanakan beberapa kejuruan pelatihan pada program pelatihan kerja berbasis kompetensi yaitu 2 paket bantuan pelatihan kejuruan menjahit dan otomotif sepeda motor, hal ini tidak sebanding dengan usulan kejuruan pelatihan yang di ajukan yaitu 36 usulan masyarakat Kabupaten Serang yang telah tercantumkan dalam rencana kerja tahun 2024.

Pada sub aspek penilaian kedua yaitu anggaran pelatihan, anggaran pelatihan kerja berbasis kompetensi memiliki nominal anggaran yang tidak stabil dalam realisasinya dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Anggaran pelatihan kerja berbasis kompetensi bersumber dari APBD. Anggaran pelatihan kerja berbasis kompetensi dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Table 2. Realisasi Anggaran pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi tahun 2022-2024**

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2022	RP. 503.933.200	RP. 383.409.200	76,08%
2.	2023	Rp. 815.500.000	Rp.746.812.80 0	91,58%
3.	2024	Rp. 986.091.900	Rp. 964.02.000	97,06%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

Tabel 3 menunjukkan realisasi anggaran setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan temuan lapangan yang didapatkan bahwa keterbatasan anggaran pelatihan kerja berbasis kompetensi tentunya mengakibatkan dampak pada pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi ketika di terapkan kepada masyarakat Kabupaten Serang yaitu dalam hal penyediaan paket bantuan pelatihan, pada tahun 2024 hanya menyudiakan paket bantuan pelatihan 2 paket pelatihan saja yaitu menjahit 3 paket dan 1 paket pelatihan otomotif. Realisasi anggaran yang besar pada tahun 2024 di nilai belum semua dapat mewujudkan usulan pelatihan yang di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Serang, sehingga hal tersebut dalam penyediaan anggaran harus di rinci sesuai dengan kebutuhan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Realiasasi anggaran pelatihan yang mengalami kenaikan dan penurunan tentunya berdampak pada jumlah paket pelatihan yang akan di laksanakan.

Kualitas sumber daya manusia tentunya sangat berpengaruh akan keberhasilan program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi melibatkan sumber daya manusia pada proses pemberian materi pelatihan dengan cara bekerjasama dengan berbagai stakeholder di antaranya Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Serang dan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK.

Kerjasama dengan LPK dalam Kerjasama penyediaan instruktur tentunya kriteria penyediaan instruktur pelatihan harus dibuktikan dengan status pendirian LPK ataupun terakreditasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, LPK yang terdaftar di dinas hanya 6 LPK yang terakreditasi 14 LPK di Kabupaten Serang belum terakreditasi, sehingga sulit membuka pelatihan dengan kejuruan terbaru. Selain Kerjasama penyediaan instruktur pelatih tentunya kerjasama dilakukan dalam memberikan sarana prasarana pelatihan kerja. Penyediaan sarana prasarana pelatihan belum memadai dan diharuskan untuk melakukan kerjasama dalam menyediakan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Gambar 2 menunjukkan sarana prasarana yang digunakan pada pelatihan menjahit sebagai berikut.

**Gambar 2. Sarana prasarana pelatihan menjahit**



Sumber ( Peneliti 2025)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang hanya dapat menyediakan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan jumlah peserta pelatihan, misalnya pada pelatihan menjahit yang di laksanakan di tahun 2024 hanya memberikan 5 mesin jahit dan 5 mesin obras saja untuk ketersediaan 20 peserta pelatihan dan digunakan dengan cara bergantian dengan kapasitas peserta pelatihan yang banyak serta kualitas alat pada mesin jahit yang digunakan sangat terbatas tidak bisa digunakan untuk semua bahan.

### **Evaluasi Proses (Proses Evaluation)**

Menurut Stufflebeam, dan Shinkfield (1985:173), Evaluasi Proses memiliki tujuan untuk memberikan feedback dengan memberikan informasi untuk penyesuaian dalam pelaksanaan. Pendokumentasian proses dan termasuk penyediaan umpan balik mengenai (a) sejauhmana pelaksanaan kegiatan yang direncanakan (kesesuaian jadwal, penggaran, prosedur pelaksanaan, konflik yang timbul, kondisi pelaksanaan di lapangan, serta kekuatan dan kekurangan sumber daya, cacat desain perencanaan) (b) apakah penyesuaian rencana atau revisi di perlukan.

Pada Evaluasi Proses peneliti membagi dua sub aspek penilaian yaitu pertama mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kedua hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi dilaksanakan sesuai dengan materi yang berstandar SKKNI yang meliputi dua materi yaitu teori dan praktek. Penerapan teori kepada peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi tentunya di lakukan oleh instruktur pelatih yang telah bekerjasama dengan lembaga pelatihan dan BBPVP Serang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang pada

tahun 2024 hanya melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yaitu pelatihan menjahit yang dilaksanakan di Desa Sukamenak, Sukacai Kecamatan Baros dan Desa Babakan Kecamatan Bandung dan pelatihan otomotif dilaksanakan di Desa Tambiluk Kecamatan Petir.

Proses pelaksanaan pelatihan menjahit dan otomotif yang dilaksanakan di Desa Sukamenak, Desa Sukacai, Desa Babakan, dan Desa Tambiluk Kabupaten Serang peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi instruktur pelatih akan memberikan materi dan praktek dalam pelaksanaannya, materi yang diberikan kepada para peserta pelatihan tentunya sesuai dengan kejuruan yang dilaksanakannya dan sudah berstandar SKKNI. Peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi setelah di berikan pemahaman teori pelatihan nantinya akan dilaksanakan praktek dan akan dilakukan uji kompetensi untuk mengetahui pemahaman peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan menguji peserta pelatihan dengan cara membuat rok dan akan mendapatkan sertifikat penghargaan BNSP. Gambar 3. Menunjukkan pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Desa Sukamenak kecamatan Baros.

**Gambar 3. Pelaksanaan pelatihan menjahit**



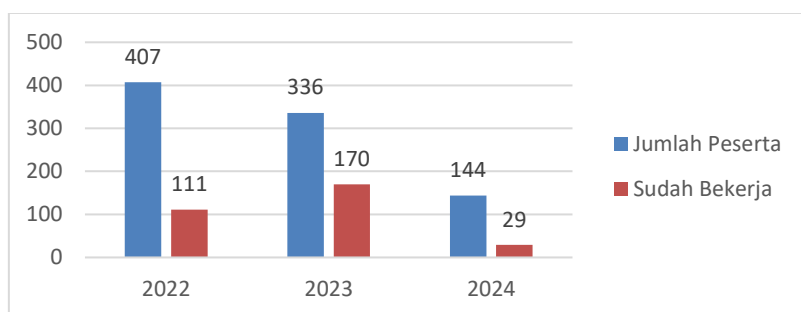
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang

Peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi pada kejuruan menjahit akan di bekali materi dan juga mendapatkan fasilitas yaitu baju pelatihan, alat untuk pelatihan, dan modul pelatihan. Pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi memiliki waktu pelaksanaan 20 hari saja, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hal tersebut banyak peserta pelatihan yang kesulitan untuk memahami secara cepat dikarenakan ketersediaan waktu pelatihan yang terbatas. Selain itu program pelatihan kerja berbasis kompetensi pada kejuruan menjahit diikuti oleh peserta pelatihan hanya 16 sampai dengan 20 peserta saja dengan peserta pelatihan harus berusia produktif dan mayoritas di ikuti oleh ibu-ibu rumah tangga. Pada proses pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi terdapat monitoring dan evaluasi pada pelaksanaannya. Proses monitoring hanya di lakukan pada pembukaan saja tidak selama 20 hari berturut turut dan selesai melaksanakan pelatihan peserta tidak di bimbing atau di evaluasi atau diarahkan sampai mendapatkan pekerjaan. Hambatan lainnya yaitu pada tempat pelaksanaan pelatihan tidak meratanya desa atau kecamatan yang mendapatkan pelatihan hal ini dikarenakan jumlah paket pelatihan yang terbatas.

## Evaluasi produk (Product Evaluation)

Evaluasi produk peneliti membagi dua sub aspek penilaian evaluasi yaitu pertama pada penilaian pencapaian indikator keberhasilan program yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan program pelatihan kerja berbasis kompetensi dan dampak kebijakan dari program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para informan menunjukkan bahwa salah satu keberhasilan pelatihan kerja berbasis kompetensi banyak peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi memanfaatkan pelatihan dengan baik, seperti temuan lapangan yang didapatkan oleh peneliti yaitu pada salah satu peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi pada kejuruan menjahit yang berhasil memanfaatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan cara membuka usaha jahit rumahan. Usaha jahit yang dimiliki peserta pelatihan kejuruan menjahit tersebut berlokasi di Desa Sukamenak Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Dan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi yang berhasil membuka usaha bengkel di Desa Tambilik Kecamatan Petir. Akan tetapi tidak semua lulusan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi dapat memanfaatkan pelatihan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data Tingkat keberhasilan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi pada gambar 4 sebagai berikut.

**Gambar 4. Data keberhasilan peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang

Dari data tersebut menunjukkan bahwa, penyerapan keberhasilan dari jumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi menunjukkan perubahan yang belum optimal dikarenakan jumlah peserta yang mendapatkan pekerjaan ataupun membuka usaha di setiap tahun mengalami jumlah peningkatan dan penurunan. Selanjutnya pada hasil temuan lapangan peneliti yang didapatkan dari wawancara dari para informan pada sub aspek penilaian kedua pada evaluasi produk yaitu dampak kebijakan pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi belum sepenuhnya memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Serang dikarenakan keterbatasan kuota pelatihan.

## KESIMPULAN

Manurut hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan di tahun 2024 belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik dan belum optimal dalam

pengimplementasiannya dilapangan karena masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dinilai menggunakan analisis dari Daniel L Stufflebeam yang terdiri dari 4 aspek yaitu sebagai berikut.

Pertama evaluasi konteks Pada aspek Evaluasi konteks dengan sub aspek yaitu latar belakang program dan tujuan sasaran program, dari program pelatihan kerja berbasis kompetensi atas dasar kebutuhan dari masyarakat kabupaten serang yang mengusulkan akan pelatihan kerja yang di butuhkan, dan pelatihan kerja berbasis kompetensi telah di atur sesuai dengan peraturan yang mengaturnya yaitu perda Kabupaten Serang nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Serta dalam pelaksanaannya telah di atur melalui Kerangka Acuan Kerja. Oleh karena itu, evaluasi konteks pada pelatihan kerja berbasis kompetensi sejalan dengan latar belakang, tujuan dan sasaran dari pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Kedua, Pada aspek Evaluasi input dengan sub aspek penilaian desain program, anggaran, sumber daya manusia. Secara keseluruhan belum optimal dalam pengimpelensiannya karena terdapat beberapa hambatan. Dalam penilaian sub aspek desain pelaksana program pelatihan kerja berbasis kompetensi usulan pelatihan kerja berbasis kompetensi atas dasar kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang belum sepenuhnya dapat di wujudkan dalam pelatihan, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang hanya mengandalkan instruktur pelatih dari LPK saja dan tidak adanya instruktur pelatih dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang pada pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Ketiga evaluasi proses belum optimal dalam pengimplementasiannya kepada masyarakat Kabupaten Serang. Dalam Proses pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi terapat ketidak sesuaian dalam waktu pelatihan kerja yaitu hanya dilaksanakan dengan waktu 20 hari pelatihan. Hal ini mengakibatkan masyarakat Kabupaten Serang sulit untuk memahami materi dan teori pada pelatihan kerja berbasis kompetensi karena waktu pelaksanaan yang singkat, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai pada pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Selanjutnya pada proses monitoring dan evaluasi selama proses pelatihan berlangsung masyarakat Kabupaten Serang hanya di awasi ketika pelaksanaan akhir pelatihan serta dilakukan uji kompetensi hanya di akhir pelatihan saja dan akan di berikan sertifikat yang bisa digunakan. Hambatan lainnya terdapat pada kurangnya partisipasi masyarakat kabupaten serang akan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Keempat evaluasi produk, pada aspek Evaluasi Produk pada hasil dari dampak kebijakan pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis kompetensi belum sepenuhnya memberikan dampak secara keseluruhan karena peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi yang telah lulus pelatihan tidak memanfaatkan pelatihan dengan baik. Artinya indikator keberhasilan dari program pelatihan kerja berbasis kompetensi peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi yang telah mengikuti pelatihan belum semua peserta memanfaatkan hasil dari pelatihan yang diikutinya dengan membuka usaha atau bekerja, hal ini dalam kondisi dilapangan belum tercapainya indikator keberhasilan tersebut.

Adapun saran dari peneliti yaitu perlunya peningkatan pada program pelatihan kerja berbasis kompetensi perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang mulai dari alur pelaksanaan program pelatihan, kemudian dampak dari program pelatihan kerja berbasis kompetensi, dan ketentuan yang dapat mengikuti program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat kabupaten serang untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi. Selain itu perlu peningkatan sumber daya manusia instruktur pelatih dalam melatih para peserta pelatihan dan harus adanya pendampingan khusus dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten serang atau di sediakannya teman pendamping pelatihan untuk mengawasi peserta sampai benar- benar memanfaatkan pelatihan dengan baik ataupun membuka usaha secara mandiri.

## REFERENSI

- Agustino, Leo (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan*. PT. Cita Intrans Publishing
- Agustino, Leo (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi 2)*. Bandung : CV Alfabeta
- Ambiyar, Dr., & Muharika, Dr., D., SST., M.PS.T. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Anggraeni, Desy. (2023). *Evaluasi Program Pelatihan Kerja Dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang*. (Skripsi). Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Dharmawan, M. R. F., Rifai, M., & Azijah, D. N. (2022). Evaluasi Program Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2021. *Reformasi*, 12(1), 19-26.
- Priatna, M. I. V. (2023). *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Doctoral dissertation, perpustakaan)*.
- Lestari, W. E. W. (2018). *Evaluasi Program Kursus Office Terpadu Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Bimantara Klaten*. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1), 53-61.
- Fadillah, S., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). *EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES ) BATU LAWANG DESA PARIGI KECAMATAN SAKETI*.
- Munandar, T. A. M. & D. (2020). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Komunitas Nelayan Tradisional untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar*



*Kabupaten Serang. Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah, 5(2), 126–133.*  
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/E-Plus/article/viewFile/9252/6030>